

**AFILIASI:**

<sup>1,2,STIE</sup>Taman Siswa Banjarnegara, <sup>3</sup>Fakultas  
Ekonomika dan Bisnis Universitas  
Wijayakusuma Purwokerto

**\*KORESPONDENSI:**

yubiharto2016@gmail.com

**THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN:** <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPK>

**DOI:** [10.32534/jpk.v11i4.6480](https://doi.org/10.32534/jpk.v11i4.6480)

**CITATION:**

Yubiharto, Y., Maesaroh, S. ., &  
Murdijaningsih, T. . (2024). Analisis  
Pengelolaan Keuangan Bumdesma Dalam  
Rangka Memberdayakan Potensi Desa Di  
Kabupaten Banyumas: Pengelolaan  
Keuangan BUMDesma. Jurnal Proaksi,  
11(4), 704–718.  
<https://doi.org/10.32534/jpk.v11i4.6480>

**Riwayat Artikel :****Artikel Masuk:**

25 September 2024

**Di Review:**

10 Oktober 2024

**Diterima:**

18 November 2024

## Analisis Pengelolaan Keuangan Bumdesma Dalam Rangka Memberdayakan Potensi Desa Di Kabupaten Banyumas

Yubiharto<sup>1\*</sup>, Siti Maesaroh<sup>2</sup>, Tjahjani Murdijaningsih<sup>3</sup>

**Abstrak**

Pengelolaan keuangan yang baik merupakan kunci keberhasilan sebuah usaha, sehingga dalam penelitian ini akan digali permasalahan terkait pengelolaan keuangan, terkait informasi akuntansi oleh pihak yang membutuhkan untuk pengambilan keputusan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma). Pengelolaan keuangan BUMDesma yang baik dapat memberdayakan potensi daerah. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan BUMDesma dalam rangka memberdayakan potensi desa. Penelitian dilakukan di Kabupaten Banyumas dengan obyek penelitian BUMDesma di seluruh Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan teknik dalam pengumpulan data adalah wawancara mendalam, *focus group discussion*, dan dokumentasi dengan menggunakan triangulasi. Sampel penelitian sebanyak 10 BUMDesma yang terdiri manajer dan pemegang keuangan yang langsung bersentuhan dengan laporan keuangan BUMDesma dan pendamping desa sehingga total sampel 30 informan. Berdasarkan dari hasil wawancara mendalam, hasil penelitian adalah diperlukan pengelolaan keuangan yang baik, terutama dalam pelaporan keuangan yang terstandarisasi menggunakan sistem informasi dan adanya kesempatan untuk pengembangan usaha. Pengelolaan keuangan yang baik harus didukung oleh adanya sistem informasi akuntansi dalam bentuk aplikasi keuangan BUMDesma, SDM yang memadai dan kebijakan Pemerintah daerah yang mendukung.

**Kata Kunci:** Keuangan, BUMDesma, Desa, Informasi, Akuntansi

**Abstract**

*Good financial management is the key to the success of a business, so this study will explore problems related to financial management, related to accounting information by parties who need it for decision making of the Joint BUMDesma. Good BUMDesma financial management can empower regional potential. This study aims to determine how far BUMDesma financial management is in order to empower village potential. This study was conducted in Banyumas Regency with BUMDesma research objects in all Sub-districts in Banyumas Regency. The research method is a qualitative method and the data collection techniques used are in-depth interviews, focus group discussions, and documentation using triangulation. The sample in this study was 10 BUMDesma consisting of managers and financial holders who are directly in contact with BUMDesma financial reports and village assistants so that the total sample is 30 informants. Based on the results of in-depth interviews, the results of the study are that good financial management is needed, especially in standardized financial reporting using an information system and the existence of opportunities for business development. Good financial management must be supported by an accounting information system in the form of BUMDesma financial applications, adequate human resources and supporting local government policies.*

**Keywords:** Finance, BUMDesma, Village, Information, Accounting

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan perusahaan menjadi hal yang mendasar dalam keberhasilan suatu usaha. Penelitian tentang pentingnya kinerja keuangan sebagai barometer keberhasilan usaha (Yubiharto & Hastuti, 2020). Selain itu faktor ekonomi dan tata kelola yang baik juga perlu diperhatikan (Yubiharto et al., 2021; Yubiharto & Rudianti, 2021). Pengelolaan keuangan yang baik juga perlu menjadi fokus yang utama dalam BUMDesma. Keberadaan BUMDesma diyakini membuat tatanan perekonomian wilayah pedesaan akan menjadi lebih baik. Karena BUMDesma didirikan sebagai dasar komitmen bersama masyarakat yang ada di pedesaan untuk bekerjasama dalam menggalang kekuatan ekonomi rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, BUMDesma didirikan juga untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat desa. Modal BUMDesma sebagian besar dimiliki oleh desa, sedangkan pengembangan BUMDesma merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga ekonomi desa, BUMDesma juga merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal.

Kabupaten Banyumas terdapat 27 kecamatan dan memiliki 21 BUMDesma di 27 kecamatan. Dari 21 BUMDesma di Kabupaten Banyumas terdapat 10 BUMDesma yang sudah berjalan dengan baik, sedangkan lainnya masih belum optimal. Kendala yang dihadapi oleh BUMDesma antara lain, kurangnya SDM yang memadai yang mengelola BUMDesma, kurangnya pengetahuan pengelola BUMDesma terhadap perkembangan perekonomian secara global, dan juga kurangnya pengetahuan terhadap pengelolaan keuangan dalam BUMDesma. Pengelolaan keuangan BUMDesma terutama dalam pelaporan keuangan sudah diatur dalam [Peraturan Pemerintah Nomor 11/2021](#) tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama dan juga [Peraturan Menteri Desa Nomor 15/2021](#) tentang proses transformasi pengelolaan dana eks PNPM mandiri pedesaan menjadi BUMDesma Bersama tetapi dalam pelaksanaan terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan keuangannya dan banyak idle maney yang tidak termanfaatkan dengan baik.

Pengelolaan keuangan yang efektif merupakan kunci keberhasilan sebuah usaha, sehingga dalam penelitian ini akan digali permasalahan terkait pengelolaan keuangan, baik penyajian informasi akuntansi oleh pihak-pihak yang membutuhkan, penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan pengelola BUMDesma maupun penyusunan laporan keuangan. Dengan mengetahui kendala yang ada di setiap BUMDesma baik yang sudah berjalan maupun yang terkendala diharapkan akan mendapatkan model informasi akuntansi pengelolaan keuangan BUMDesma untuk pengambilan keputusan pengelola BUMDesma maupun pihak eksternal. Penelitian terkait pengelolaan keuangan di perusahaan yang go publik di Indonesia baik dari sisi kinerja keuangan (Yubiharto, 2020), pengakuan laba (Yubiharto & Rudianti, 2021), tata kelola perusahaan (Yubiharto, 2021), maupun pengaruh dari faktor ekonomi makro (Yubiharto et al., 2021) menjadi dasar penerapan tata kelola yang baik di BUMDesma.

Penelitian terkait pengelolaan keuangan terutama tentang transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan di BUMDes sudah dilakukan oleh beberapa peneliti ([Dina & Diana Elvianita, 2017](#); [Fahrizal, 2018](#); [Sari & Sudana, 2020](#)). Penelitian terkait tata kelola keuangan BUMDesma Kampung Batik ([Firdaus & Faisol, 2020](#)). Penelitian tentang kinerja keuangan BUMDesma Pogalan (Wardani, 2023). Selain faktor keuangan beberapa peneliti juga sudah melakukan penelitian tentang peran BUMDesma dalam pembangunan desa. Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu ada beberapa kelemahan, pertama, sebagian besar penelitian berfokus pada BUMDes, sementara penelitian terkait dengan BUMDesma masih sangat terbatas sedangkan BUMDesma juga merupakan aset kecamatan yang tingkat perkembangannya relatif lebih bisa dioptimalkan dikarenakan mempunyai sumberdaya di desa-desa dimasing-masing kecamatan. Kedua, semua penelitian hanya melihat permasalahan dan penyelesaian permasalahan secara parsial, sementara permasalahan-permasalahan tersebut dapat digali secara menyeluruh agar dapat disusun sebuah model penyelesaian untuk perkembangan BUMDesma. Sehubungan dengan hal tersebut di atas keterbaruan dari penelitian ini adalah menggali permasalahan pengelolaan keuangan terkait dengan

informasi akuntansi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, kendala pengelolaan keuangan dan peran BUMDesma sebagai kunci keberhasilan usaha secara general di BUMDesma dalam satu kabupaten sehingga menjadi dasar penyusunan model pengelolaan keuangan BUMDesma.

## **KAJIAN PUSTAKA**

BUMDesma adalah badan usaha di kecamatan yang merupakan kerjasama 2 (dua) desa atau lebih untuk mengelola usaha, menggunakan aset dengan baik, mengembangkan tingkat investasi dan produktivitas. BUMDesma menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu BUMDesma dibentuk merupakan wujud rekap terhadap aset dana bergulir yang merupakan eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan. Sejak eks PNPM mandiri pedesaan berakhir sampai saat ini belum ada aturan yang dapat digunakan dalam pengolahan aset tersebut. Dengan adanya [Peraturan Pemerintah Nomor 11/2021](#) tentang BUMDesma dan [Peraturan Menteri Desa Nomor 15/2021](#) tentang proses transformasi pengelolaan dana eks PNPM mandiri pedesaan menjadi BUMDesma Bersama. Dengan demikian seluruh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) agar tetapneksis harus bertransformasi menjadi BUMDesma. BUMDesma dibentuk dengan Musyawarah Antar Desa (MAD) dengan mendasarkan pada Peraturan Bersama Kepala Desa. BUMDesma dibentuk oleh desa dikarenakan adanya keterbatasan pada banyak aspek yang mempengaruhi seperti sumberdaya manusia, permodalan, dan potensi daerah. Diharapkan kebersamaan pengelolaan aset desa akan memunculkan kekuatan yang lebih kuat untuk menjamin keberlangsungan dan pengembangan unit usaha yang sudah didirikan. UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 87 adalah merupakan Undang Undang hasil dari bentuk penerapan Badan Usaha Milik Desa Bersama. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pembentukan BUMDesma didasari dengan adanya azas kekeluargaan dan gotong-royong untuk mendayagunakan potensi ekonomi.

Pengelolaan keuangan membutuhkan integritas pelaporan keuangan. Integritas pelaporan keuangan dapat ditingkatkan melalui penerapan sistem informasi manajemen dan pengendalian internal. Sistem informasi pengelolaan keuangan yang efektif dapat memudahkan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas baik sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sistem informasi manajemen akan mengatasi masalah keamanan data, pengambilan informasi tepat waktu, ketepatan laporan, variasi laporan, dan kepatuhan terhadap keuangan pemerintah (Rachmad *et al.*, 2024). Teknologi informasi akan menjadi hal yang penting yang menjadi kekuatan pendorong transformasi ekonomi dan Peningkatan perusahaan untuk menghadapi hal-hal baru, tantangan dan peluang yang dibawa oleh digital transformasi, dengan digital transformasi akan membantu perusahaan untuk menghadapi perubahan besar di perekonomian (Xu & Zhang, 2024).

BUMDesma akan dikelola dengan baik, hal ini dilakukan karena BUMDesma merupakan salah satu sumber dana desa yang dapat digunakan untuk mengelola kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang terbentuk dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang harus dikelola secara profesional, dengan mengandalkan pada potensi asli desa ([Muntahanah, Siti. Murdijaningsih, 2020](#)). Dengan pengelolaan BUMDesma yang baik dapat membuat usaha masyarakat akan lebih produktif dan efektif. Sehingga dengan demikian BUMDesma akan lebih berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa. BUMDesma juga sekaligus menjadi lembaga atau unit yang usaha yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang akan berkembang sesuai ciri khas desa dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian desa. Keberadaan BUMDesma sangat penting bagi masyarakat desa, hal ini disebabkan karena dengan adanya BUMDesma bisa membantu masyarakat seperti memberikan pinjaman dana dalam mendirikan usaha yang di jalankan oleh masyarakat dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang pengangguran. Masalah yang muncul dalam BUMDesma ini adalah keterbatasan sumber daya manusia di bidang akuntansi terutama proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (Widiyohening, 2023). Beberapa kendala yang

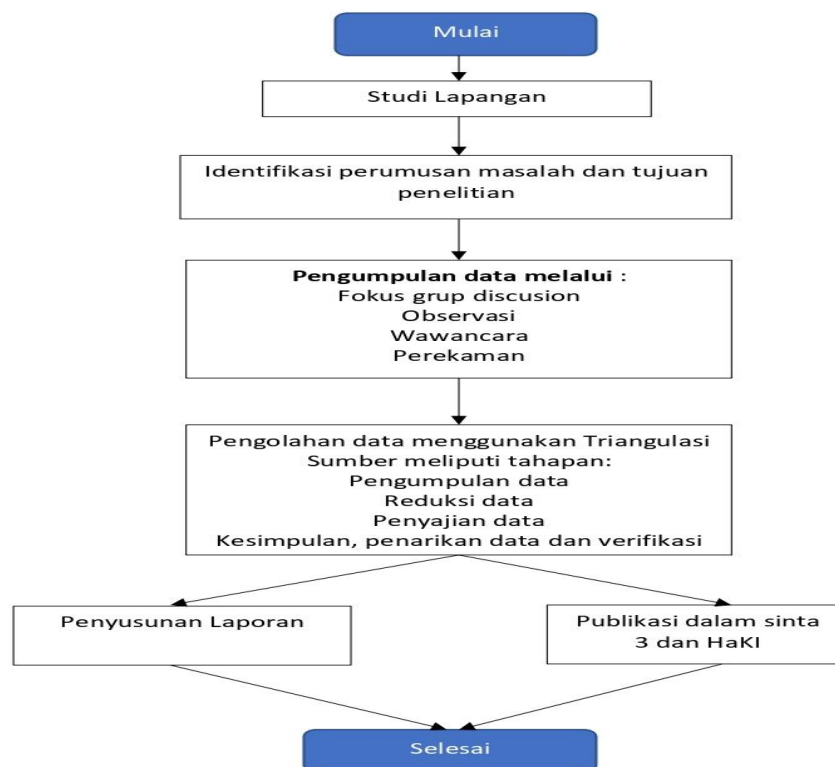
dihadapi oleh BUMDesma dalam meningkatkan kinerjanya adalah keterbatasan SDM untuk pengelolaan usaha dan pengembangan usaha. Selain permasalahan tersebut adanya potensi yang tinggi bagi BUMDesma untuk mengembangkan perekonomian desa, mendorong usaha mikro masyarakat agar terjadi peningkatan dalam usahanya dan peningkatan dalam kesejahteraannya. Pengelolaan keuangan menjadi hal yang penting dalam pengelolaan dan keberlanjutan BUMDesma sehingga dalam penelitian ini akan disajikan model pengelolaan keuangan BUMDesma yang terdiri dari pelaporan, analisis pasar dan pengembangan usaha (kelayakan usaha). Untuk mendapatkan model pengelolaan keuangan tersebut dalam tahap pertama penelitian ini melalui identifikasi pengelolaan keuangan yang sudah berjalan dan yang dibutuhkan oleh BUMDesma.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah adalah penelitian metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data diskriptif berupa bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan pada BUMDesma di kabupaten Banyumas dari sampel yang digunakan sebagai informan penelitian. Dalam rangka memperoleh data yang digunakan dalam penelitian maka akan dilakukan observasi secara langsung kepada orang-orang yang berhubungan langsung dalam proses penyusunan pengelolaan keuangan BUMDesma di Kabupaten Banyumas. Teknik pengambilan sampel dengan melakukan pertimbangan tertentu sehingga yang dijadikan informan adalah benar-benar orang yang tahu masalah pengelolaan keuangan BUMDesma, untuk itu sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan keuangan dan pengambil keputusan karena beliau yang bisa memutuskan tentang penggunaan anggaran. Informan tersebut adalah manajer BUMDesma, bagian keuangan dan pendamping desa di setiap kecamatan. Pendamping desa digunakan sebagai informan karena sesuai dengan Permendes tahun 2023 Pendamping Desa mempunyai peran untuk mempercepat proses administrasi yang berhubungan dengan dana desa yang diperoleh di tingkat kecamatan dan bertanggung jawab memastikan penyaluran, perencanaan, pemanfaatan, dan pelaporan dana desa agar dapat dikelola secara efisien. Berdasarkan hasil identifikasi diperoleh jumlah BUMDesma yang dijadikan sampel ada 10 BUMDesma. Masing masing BUMDesma terdiri dari tiga informan yang terdiri dari direktur dan bendahara BUMDesma serta pendamping desa sehingga total informan sebanyak 30 informan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan model triangulasi data. Triangulasi data menggunakan analisis interaktif, ada tiga komponen dalam model ini yaitu reduksi data, menyajikan data dan membuat penarikan kesimpulan atau melakukan verifikasi yang dilakukan dalam bentuk interaktif, proses pengumpulan data adalah sebagai suatu siklus. Setelah data semua terkumpul dalam bentuk penyajian data langkah berikutnya adalah melakukan reduksi data, Hal ini dilakukan karena data yang didapatkan selama *interview* sangat banyak, dan tidak semua hasil *interview* relevan dengan permasalahan. Setelah melakukan reduksi data langkah berikutnya adalah melakukan verifikasi. Hal ini dilakukan berulang-ulang membentuk suatu siklus dan baru akan dihentikan apabila data yang diperoleh sudah mencukupi. Dalam penelitian model triangulasi data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah merupakan tehnik yang menggunakan pengecekan dan membandingkan keabsahan data berdasarkan waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan membandingkan data dari hasil pengamatan dengan hasil data dari hasil wawancara yang terstruktur. Kemudian dilakukan dengan cara membandingkan apa yang disampaikan informan di depan umum dengan yang disampaikan secara pribadi. Selanjutnya membandingkan apa yang disampaikan orang-orang pada situasi penelitian dengan apa yang disampaikan sepanjang waktu. Metode ini juga dilakukan dengan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain. Hal lain dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang tersedia.

Validitas data diperiksa dengan menggunakan metode triangulasi, model triangulasi data ini adalah teknik pemeriksaan dengan melihat keabsahan data dengan memanfaatkan informasi diluar data yang digunakan untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding dengan data yang didapatkan. Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan suatu teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada. Triangulasi sumber membandingkan data hasil dari sebuah pengamatan dengan hasil yang diperoleh dari data wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan apa yang disampaikan informan terhadap tentang situasi penelitian dengan apa yang disampaikan informan dari waktu ke waktu. Selanjutnya melakukan perbandingan prespektif dan keadaan pendapat informan dengan berbagai pendapat dan pandangan informan lainnya. Terakhir dengan cara membandingkan hasil wawancara terhadap informan dengan isi dokumen yang berhubungan. Berikut ini Diagram Alir untuk penelitian kualitatif.



Gambar 1 Langkah langkah dalam penelitian

Keterangan:

1. Studi Lapangan: penelitian diawali dengan melakukan studi lapangan untuk memetakan subyek dan obyek penelitian
2. Selanjutnya berdasarkan studi lapangan kemudian melakukan identifikasi perumusan masalah dan tujuan penelitian
3. Langkah berikutnya pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan perekaman atau *fokus grup discusion*.
4. Berdasarkan hasil pengumpuln data dilakukan pengolahan data dengan menggunakan triangulasi sumber sampai pada penyusunan kesimpulan, penarikan data dan verifikasi data.

## HASIL

Potensi masyarakat desa harus dimanfaatkan dengan baik melalui kebijakan serta usaha yang keras untuk meningkatkan dan membantu perekonomian untuk masyarakat dpada golongan ekonomi menengah ke bawah. Peningkatan usaha membutuhkan modal dan diharapkan pemenuhan modal dapat diperoleh dengan mudah. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah merupakan suatu lembaga keuangan bukan bank yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat. Program PNPM didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 30 April 2007. Dikarenakan dinilai kurang efektif pada tahun 2014 PNPM dihentikan dengan berbagai alasan. Pada tahun 2015 PNPM berjalan kembali dengan berubah nama menjadi Badan Usaha Milik Desa yang pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh Unit Pengeloa kegiatan (UPK). UPK didirikan mempunyai maksud untuk membantu kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah. UPK adalah merupakan salah satu program yang didirikan oleh pemerintah, yang merupakan lembaga bukan bank (non bank) sebagai alternatif masyarakat untuk memperoleh pendanaan secara mudah dan dilakukan secara berkelompok.

Berdasarkan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021](#) menyatakan bahwa pengelola kegiatan dari dana bergulir masyarakat eks PNPM Mandiri Perdesaan wajib atau diharuskan merubah menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma.) BUMDesma dibentuk merupakan pengalihan aset dana bergulir eks PNPM Mandiri Pedesaan.Semenjak berakhirnya eks PNPM mandiri pedesaan sampai saat ini belum terbit aturan mengenai pengolahan atas aset BUMDesma tersebut. Sehingga pengelolaan aset dalam BUMDesma masih menjadi kebijakan pada masing masing BUMDesma tersebut. Hal tersebut menjadikan BUMDesma tidak optimal dalam pengelolaan aset.

BUMDesma di Kabupaten Banyumas rata-rata mulai berdiri sekitar bulan Januari 2023. Sesuai amanat [Peraturan Pemerintah no.11 tahun 2021](#) tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa setelah PP no 11 tahun 2021 disahkan maka maksimal 2 tahun sejak PP disahkan, PNPM harus berubah menjadi BUMDesma. Sampai tahun 2024 BUMDesma di Kabupaten Banyumas sebanyak 21 BUMDesma. Hampir seluruh BUMDesma di Kabupaten Banyumas sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya pelaporan keuangan secara rutin setiap bulan, dan satu semesteran disampaikan ke pengawas, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan laporan tahunan disampaikan saat Musyawarah Antar Desa (MAD).

Untuk mengetahui lebih mendalam pengelolaan keuangan di BUMDesma Kabupaten Banyumas diambil sampel sebanyak 10 BUMDesma baik yang sudah berjalan dengan baik maupun yang belum. 10 BUMDesma tersebut adalah BUMDesma Artha Mandiri, BUMDesma Cilongok Raya, BUMDesma Jati Mandiri, BUMDesma Sembada, BUMDesma Serayu Mas, BUMDesma Liringgalih 13, BUMDesma Kembar Sejahtera, BUMDesma Kedung Artha, BUMDesma Dana Penguripan dan BUMDesma Banyumili. Metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan yang dianggap mewakili dengan permasalahan yang dikaji. Informan yang dipilih adalah jajaran pengelola BUMDesma yang bersentuhan langsung dengan pelaporan keuangan BUMDesma meliputi Direktur dan bendahara. Hasil wawancara yang sudah dianalisis dan dilakukan reduksi data dapat disajikan pada tabel 1.

**Tabel 1. Analisis Data Hasil Wawancara**

Tema Wawancara	Point Wawancara	Kode	Informan	Hasil Wawancara
Dukungan Atasan	Ada/Tidak aturan pemerintah tentang pengelolaan BUMDesma	WW#2	Direktur BUMDesma Liringgalih, Karanglewas	Ada dan sudah disosialisasikan dengan baik
		WW#8	Direktur BUMDesma	Ada tetapi hanya berisi kewajiban untuk melaporkan keuangan secara berkala

**Yubiharto, Maesaroh & Murdijaningsih**

Analisis Pengelolaan Bumdesma Dalam Rangka Memberdayakan Potensi Desa Di Kabupaten Banyumas

			Sembada, Gumelar	
		WW#7	Direktur BUMDesma Banyumili, Banyums.	Ada sebagai pegangan kami dalam membuat laporan keuangan
	Ada/Tidak Monev pengelolaan keuangan	WW#9	Direktur BUMDesama Dana Penguripan Lkd, Kalibagor	Ada dan dilakukan secara berkala oleh Pengawas BUMDesma.
		WW#3	Direktur BUMDesma Serayu Mas Lkd, Somagede	Hanya pelaporan bulanan yang diberikan
		WW#1	Direktur BUMDesma Jati Mandiri Lkd Purwojati	Ada evaluasi setiap tahun tetapi tidak di monitoring secara berkala
Sistem Informasi Akuntansi	Sudah/Belum terstandarisasi	WW#5	Direktur BUMDesma Cilongok Raya Lkd, Cilongok	Sudah terstandarisasi karena ada dalam aturan laporan keuangan yang harus dilaporkan
		WW#1	Direktur BUMDesma Jati Mandiri Lkd Purwojati	Belum, kami membuat sesuai dengan aplikasi yang kami buat
		WW#6	Direktur BUMDesma Kembar Sejahtera Lkd, Kembaran	Secara umum ada tetapi tidak terinci untuk setiap laporannya
	Sudah/belum tersedia aplikasi pelaporan	WW#1	Direktur BUMDesma Jati Mandiri Lkd Purwojati	Belum ada, yang tersedia baru berupa excel untuk laporan keuangan
		WW#4	Direktur BUMDesma Artha Mandiri Tambak	Belum ada, yang tersedia baru berupa excel untuk laporan keuangan
		WW#3	Direktur BUMDesma Serayu Mas Somagede	Belum tersedia dan kami membutuhkan sekali untuk kelancaran pelaporan
SDM yang memadai	Ada/Tidak job diskripsi yang jelas	WW#1	Direktur BUMDesma Jati Mandiri Lkd Purwojati	Tidak ada karena keterbatasan SDM yang ada
		WW#2	Bendahara BUMDesma Liringgalih 13 Lkd	Ada karena sudah terlatih yang merupakan lanjutan dari PNPM



### Yubiharto, Maesaroh & Murdijaningsih

Analisis Pengelolaan Bumdesma Dalam Rangka Memberdayakan Potensi Desa Di Kabupaten Banyumas

		Karanglewas		
		WW#8	Direktur BUMDesma Sembada Lkd, Gumelar.	Tidak ada yang mengerjakan pelaporan keuangan hanya SDM yang ada
SDM sesuai/tidak dengan Bidanganya		WW#2	Direktur BUMDesma Sembada Lkd, Gumelar.	Sesuai, karena ada SDM yang khusus mengurus tentang pelaporan keuangan
		WW#3	Direktur BUMDesma Serayu Mas Somagede	Tidak, hanya berdasarkan pengalaman saja dalam menyusun laporan keuangan
		WW#1	Direktur BUMDesma Jati Mandiri Lkd Purwojati	Tidak ada SDM sesuai bidangnya karena SDM yang ada merupakan SDM lanjutan dari PNPM
Kebijakan Pengelolaan keuangan	Ada/Tidak kebijakan pemerintah daerah mengenai pengembangan usaha	WW#2	Direktur BUMDesma Liringgalih 13 Lkd Karanglewas	Belum tersedia kebijakan pemerintah daerah tentang pengembangan usaha
		WW#9	Direktur BUMDesama Dana Penguripan Lkd, Kalibagor	Belum tersedia, padahal kami sangat membutuhkan sebagai pegangan hukumnya
		WW#2	Direktur BUMDesma Serayu Mas Somagede	Belum tersedia padahal <i>idle money</i> ditempat kami cukup tinggi

Sumber: Diolah Penulis, 2024

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dan didukung oleh dokumen yang ada serta melakukan observasi langsung, maka hasil wawancara tersebut selanjutnya digunakan untuk mendeteksi pengelolaan keuangan BUMDesma baik dalam bentuk pelaporan maupun prosedur pelaporan. Agar pengelolaan dan pelaporan keuangan berjalan dengan baik sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum diperlukan kebutuhan teknologi informasi, SDM yang memadai dan kebijakan pemerintah daerah.

#### 1. Sistem Informasi Akuntansi

Teknologi informasi sangat berperan penting didalam dunia kerja saat ini dikarenakan dengan adanya teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi usaha, produktivitas, inovasi produk, komunikasi, kolaborasi antar lembaga dan pelayanan konsumen. Digitalisasi mempengaruhi berbagai faktor, salah satunya adalah ketepatan pengelolaan keuangan (Weber et al., 2024) Digitalisasi memainkan peran yang semakin penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan (Xu & Zhang, 2024).

Pengelolaan keuangan BUMDesma harus dilakukan secara profesional dan akuntabel, seperti yang disampaikan oleh Direktur BUMDesma Jati Mandiri Lkd Purwojati;



**“ Di BUMDesma kami, pelaporan keuangan masih menggunakan manual berupa excel, harapannya ke depan pelaporan bisa menggunakan aplikasi agar lebih cepat, praktis dan efisien, karena kami harus menyiapkan laporan bulanan, semesteran dan laporan tahunan.”**

Selaras dengan pendapat dari Direktur BUMDesma Jati Mandiri Lkd adalah bendahara BUMDesma Jati Mandiri Lkd, seperti yang disampaikan :

**“ Semua informasi mengenai pelaporan keuangan masih manual, untuk mendukung kinerja di bidang keuangan agar lebih cepat dan efisien alangkah baiknya menggunakan aplikasi seperti BUMDesma lain, harapan kami ada bantuan dari Pemerintah Daerah untuk pengadaan aplikasi laporan keuangan yang berstandar”.**

Pelaporan keuangan dengan menggunakan teknologi sangat penting, guna menunjang kinerja BUMDesma. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur BUMDesma Banyu Mili Lkd Banyumas sebagai berikut:

**“ Untuk saat ini pembuatan laporan keuangannya masih manual, kami masih menunggu program aplikasi keuangan yang akan diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas secara gratis, yang saat ini katanya masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Desa, mudah-mudahan bisa segera direalisasikan”.**

Pelaporan keuangan juga sangat penting bagi keberlangsungan hidup BUMDesma. Karena dari laporan keuangan kita bisa melihat kondisi riil perusahaan kita. hal ini seperti yang disampaikan oleh Direktur BUMDesma Serayu Mas Lkd Somagede;

**“ BUMDesma Serayu Mas Lkd untuk pelaporan keuangan masih manual, selama ini pelaporan keuangan menggunakan excel, pelaporan keuangan selama ini tidak pernah ada kendala. Dengan omset saat ini, kami anggap menggunakan excel sudah cukup, namun ke depan saat omset menjadi besar maka diperlukan sistem informasi yang lebih modern”.**

Pengelolaan keuangan BUMDesma harus dilakukan secara profesional dan akuntabel. Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan akan lebih efektif apabila menggunakan teknologi informasi, seperti yang disampaikan oleh Direktur BUMDesma Dana Penguripan Lkd Kalibagor;

**“ Kami sangat senang karena pelaporan keuangan BUMDesma Dana Penguripan Lkd sudah menggunakan aplikasi. Aplikasi ini sangat membantu kami dalam pembuatan laporan keuangan sehingga dalam proses pengerjaannya sangat dimudahkan dan bisa lebih efisien waktu dan lebih praktis. Aplikasi ini kami beli sendiri dengan menggunakan anggaran BUMDesma”.**

Dibeberapa BUMDesma juga sudah menggunakan aplikasi dalam pelaporan keuangan untuk meringankan tugas karyawan dan menuntut karyawan bekerja dengan cermat dan teliti, seperti yang disampaikan oleh Direktur BUMDesma Liringgalih 13 Lkd Kecamatan Karanglewas;

**“ Kami selaku penanggungjawab di BUMDesma selalu mendorong semua karyawan untuk selalu bekerja dengan cermat dan teliti. Kami sangat terbantu dengan adanya Program aplikasi pelaporan keuangan, pekerjaan menjadi lebih cepat, tidak perlu menjurnal atau mencatat transaksi secara manual, semua bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi. Program aplikasi ini kami beli sendiri dengan didanai dari anggaran BUMDesma. Kami bisa melihat laporan setiap waktu, tanpa harus melakukan rekap terlebih dahulu”.**

Selaras dengan pendapat dari Direktur BUMDesma Liringgalih 13 Lkd adalah bendahara BUMDesma Liringgalih 13 Lkd, seperti yang disampaikan :

**“ Di tempat kami pelaporan keuangan sudah menggunakan aplikasi, mulai dari pencatatan, posting ke buku besar sampai laporan keuangan sehingga proses pembuatan laporan keuangan bisa lebih cepat. Teknologi informasi dalam bentuk program aplikasi juga benar-benar sangat membantu kami dalam melakukan kontrol terhadap proses pembuatan laporan keuangan. Ada informasi saat ini Dinsospermades Kabupaten Banyumas sedang menunggu rekomendasi program aplikasi dari Kementerian Desa mengenai program aplikasi yang akan diberikan kepada BUMDesma secara Cuma-Cuma”.**

Dalam pelaporan keuangan BUMDesma baik bentuk mapun pelaporannya masih kurang terstandarisasi walaupun ada model-model pelaporan yang sudah ada seperti yang disampaikan oleh Direktur BUMDesma Kembar Sejahtera Lkd;

“ **laporan keuangan kalau menurut saya belum terstandarisasi dengan baik**, hal ini bisa saya sampaikan bahwa laporan keuangan antara Bumdesma satu dengan lainnya formatnya masih berbeda-beda. Namun secara prinsip akuntansi laporan BUMDesma sudah sesuai.”

Hal ini tidak senada dengan yang disampaikan oleh Direktur BUMDesma Cilongok Raya Lkd, beliau mengatakan bahwa laporan sudah terstandar karena tinggal ngisi seperti yang disampaikan:

“**Kami tinggal ngisi mengikuti form yang ada di aplikasi**, dan setiap tahun kami melakukan hal tersebut, dan selama ini tidak pernah ada komplain dari pihak pengguna laporan maupun pemerintah daerah jadi kami merasa hal tersebut sudah benar”.

## 2. SDM yang memadai

Dalam penerapan pelaporan keuangan BUMDesma diperlukan SDM yang baik sehingga laporan bisa akuntabel dan akurat, SDM yang baik perlu ditingkatkan karena dapat mempengaruhi kinerja BUMDesma (Abdullah et al., 2024). Salah satu kekuatan perusahaan terletak pada kualitas sumber daya manusia (Rustiawan et al., 2023). Untuk itu di BUMDesma di tiap-tiap kecamatan juga diperlukan orang-orang yang berkompoten dibidangnya. Supaya pelaporan bisa berjalan dengan baik dibutuhkan job diskripsi yang baik, di BUMDesma job diskripsi sudah berjalan dengan baik seperti yang disampaikan oleh Direktur Liringgalih 13 Karanglewas:

“ Di BUMDesma Liringgalih 13 Lkd, **job diskripsi sudah berjalan dengan baik**, dengan jumlah karyawan hanya 8 orang jarang terjadi mutasi sehingga karyawan terutama bendahara sudah berpengalaman dan bisa bekerja dengan baik.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur BUMDesma Kembar Sejahtera Lkd Kecamatan Kembaran sebagai berikut:

“ Di BUMDesma kami masing-masing karyawan sudah ditempatkan pada bidangnya masing-masing, cuma karena **keterbatasan SDM** yang ada sehingga masih sering terjadi tumpang tindih pekerjaan. Kami sebenarnya membutuhkan adanya pelatihan bagi karyawan, mengingat usia BUMDesma baru berjalah 1 tahun lebih sehingga membutuhkan pelatihan-pelatihan agar kemampuan karyawan bertambah.”

Peningkatan kapasitas karyawan juga sangat diperlukan untuk menunjang kinerja BUMDesma agar lebih maju. Peningkatan kapasitas karyawan dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan SDM (Shamsiya Abidovna, 2024). Hal tersebut disampaikan oleh Ditektur BUMDesma Jati Mandiri;

“ Kami sebenarnya membutuhkan diadakannya **pelatihan bagi karyawan BUMDesma** untuk tugas-tugas seperti sekretaris, bendahara dan tugas-tugas lainnya sehingga mereka lebih profesional dibidangnya”.

Ada beberapa BUMDesma yang sudah menempatkan karyawan pada bidangnya seperti yang terjadi di BUMDesma Liringgalih 13 Karanglewas, penempatan karyawan sesuai dengan pengalaman dan jenjang pendidikan yang sesuai bidang yang ditangani. Seperti yang disampaikan oleh Direktur BUMDesma Liringgalih 13;

“Karyawan kami sebagian besar adalah peninggalan dari karyawan PNPM, **karyawan kami sudah berpengalaman dalam mengelola keuangan**, sehingga di BUMDesma kami tempatkan sesuai dengan keahliannya, seperti Bapak Aan Firmansayah, SE ditempatkan sebagai bendahara, karena berlatar belakang sarjana ekonomi”.

Sebagian besar karyawan BUMDesma sudah berpengalaman, karena mereka sebagian adalah mantan karyawan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang bertransformasi menjadi BUMDesma. Seperti yang disampaikan oleh Direktur BUMDesma Dana Penguripan;

“Karyawan kami sebagian besar adalah peninggalan dari karyawan PNPM yang sudah berakhir sejak tahun 2014, sehingga **mereka sudah bisa langsung bekerja** saat PNPM bertransformasi menjadi BUMDesama”.

### 3. Kebijakan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien sangatlah penting untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis (Salamah, 2023).

BUMDesma sesuai dengan PP no 11 tahun 2021 memiliki peluang untuk melakukan usaha seperti Badan Usaha lain. Sementara kebijakan Pemerintah Daerah BUMDesma hanya boleh melakukan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Dana yang ada di BUMDesma cukup besar namun digunakan hanya untuk kegiatan simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) maka terjadilah *idle money* atau dana yang menganggur karena tidak diinvestasikan.

Sebagian besar pengelola BUMDesma menginginkan adanya pengembangan usaha lain tidak hanya SPP atau UEP, seperti yang disampaikan Direktur BUMDesma Serayu Mas;

“Kita **idle money sangat tinggi**, hal ini disebabkan karena unit usaha kita hanya simpan pinjam, sementara dana yang kita miliki cukup besar. **Kami menginginkan adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah** supaya BUMDesma diberi keleluasaan untuk menggunakan dana yang ada untuk mengembangkan unit usaha baru”.

Bendahara BUMDesma Liringgalih 13 juga menyampaikan hal yang sama bahwa “**uang kas dan bank di BUMDesma sangat besar**, setiap tahunnya masih banyak yang **tidak terserap** untuk disalurkan sehingga banyak uang yang menganggur. Agar uang yang menganggur bisa terserap maka BUMDesma diberi keleluasaan untuk membuka unit baru selain simpan pinjam harapannya laba yang diperoleh BUMDesma bisa lebih meningkat, sehingga kami **membutuhkan kebijakan dari pemerintah daerah**”.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang disampaikan oleh Kabid Pemberdayaan Ekonomi Daerah (PED) bahwa “**saat ini dinas memang belum mengizinkan BUMDesma mengembangkan unit usaha baru**, dikarenakan saat ini masih proses membenahi manajemen BUMDesma agar lebih kuat mengingat BUMDesma baru berumur satu tahun sembilan bulan. Kalau nanti dianggap sudah mampu dan siap, tentu BUMDesma akan diberikan kesempatan untuk membuka unit usaha baru”.

## PEMBAHASAN

### 1. Interpretasi Hasil Temuan

Berdasarkan dari hasil wawancara yang sudah disajikan dalam hasil di atas, maka selanjutnya mendiskripsikan temuan bukti untuk membentuk hipotesis kerja ke dalam model Luder (1992). Hasil dari temuan diatas dapat disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Aplikasi Model Luders

Variabel Kontekstual	Hipotesis Kerja	Temuan Bukti
Stimuli (Rangsangan)	- Adanya BUMDesma	- Dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik
Pengelolaan Keuangan BUMDesma	- Optimalisasi	- Pengelolaan keuangan belum optimal
Hambatan Implementasi	- Sistem Informasi Akuntansi	- Belum tersedianya aplikasi pelaporan keuangan

---

- SDM yang memadai	- Masih	kurangnya
	pengetahuan	pengelolaan
		keuangan BUMDesma
- Kebijakan Pemerintah Daerah	- Belum	adanya kebijakan
		tentang pengembangan usaha

---

Sumber: Diolah Penulis, 2024

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan masing-masing variabel kontekstual yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Stimuli (Rangsangan)

Adanya BUMDesma : Berdasarkan hasil wawancara diperoleh temuan bahwa, BUMDesma dengan omset yang besar dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik agar BUMDesma dapat berfungsi sebagai Badan usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

2. Pengelolaan Keuangan BUMDesma

Optimalisasi: Pengelolaan keuangan belum optimal dikarenakan masih belum terstandarisasinya laporan keuangan karena adanya sistem informasi akuntansi dan masih banyaknya peluang usaha yang terkendala dikarenakan belum adanya kebijakan yang mendukung.

3. Hambatan Implementasi

Sistem Informasi Akuntansi: Sistem informai akuntansi sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan, karena hasil pengelolaan keuangan yang baik tercermin dari laporan keuangan yang baik sesuai dengan standar akuntansi yang berterima umum yang terstandarisasi. Untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang baik dibutuhkan aplikasi keuangan yang seragam untuk BUMDesma yang dikeluarkan secara resmi dari pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian (Fitriansyah & Halilintar, 2024) yang menyatakan Sistem Keuangan Desa berperan peran penting dalam pemerintahan desa yang terkena dampak langsung oleh pegawai desa. Ini sejalan dengan tujuan penerapan Sistem Pembiayaan Desa, yaitu untuk membantu pekerjaan pegawai desa

SDM yang memadai: SDM yang berkualitas merupakan hal yang signifikan dalam pengelolaan keuangan BUMDesma. Dengan SDM yang berkualitas akan menghasilkan kinerja keuangan yang baik sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat terpenuhi. Hasil penelitian menemukan masih ada beberapa karyawan yang masih kurang mengetahui mengenai pengelolaan dan pelaporan keuangan dan masih memerlukan tambahan pengetahuan mengenai pengelolaan dan pelaporan keuangan. Sejalan dengan penelitian Diansari et al., (2023) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM dan sistem pengendalian internal mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa.

Kebijakan Pemerintah Daerah: Kebijakan Pemerintah mengenai BUMDesma masih dirasa kurang, hal ini disebabkan dengan omset BUMDesma yang relatif besar dan banyaknya *idle* kas. BUMDesma membutuhkan pengembangan unit usaha baru untuk meningkatkan omset BUMDesma yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Judijanto et al., (2023) yang membuktikan bahwa integrasi dalam inovasi teknologi dengan strategi pengembangan UKM akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara lokal, akan memperluas pasar, dan dapat menciptakan lapangan kerja membutuhkan dukungan kebijakan publik.

Berdasarkan hasil temuan dari wawancara yang sudah dilakukan dan analisis yang diperlukan, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan BUMDesma agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Tersedianya sistem informasi akuntansi

Tersedianya sistem informasi akuntansi dalam BUMDesma akan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang baik yang akuntabel dan transparan untuk menunjukkan tingkat pengelolaan keuangan yang baik.

2. SDM yang memadai

Masih ada beberapa SDM yang kurang berkualitas dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan pelaporan keuangan BUMDesma, hal ini disebabkan masih ada beberapa karyawan yang belum ditempatkan pada bidangnya dan tumpang tindihnya pekerjaan karena minimnya SDM yang ada di BUMDesma.

3. Kebijakan Pemerintah Daerah

Dana yang ada di BUMDesma cukup besar namun digunakan hanya untuk kegiatan simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) maka terjadilah *idle money* atau dana yang menganggur karena tidak diinvestasikan. Sebagian besar pengelola BUMDesma menginginkan adanya pengembangan usaha baru sehingga dibutuhkan kebijakan pemerintah daerah tentang pengembangan usaha. Berdasarkan hasil wawancara dan sudah dilakukan reduksi data pengembangan usaha dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal seperti usaha pengemukan sapi, usaha gula merah, PAMSIMAS dan galon isi ulang, souvenir, sirup pala dan masih banyak lagi produk produk unggulan yang dapat dikembangkan melalui BUMDesma. Karena dana BUMDesma adalah merupakan dana pemerintah sehingga setiap penggunaan dana tersebut harus ada aturan yang mendukung, sehingga BUMDesma Kabupaten Banyumas sangat menunggu adanya kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk peraturan daerah tentang pengembangan usaha BUMDesma.

## KESIMPULAN

BUMDesma dibentuk merupakan wujud rekap atas aset dana bergulir eks PNPM Mandiri Pedesaan yang mempunyai omset cukup besar. Dengan tingkat omset yang besar dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik, dalam hal ini akan terekam baik dalam pelaporan keuangan maupun pengembangan usaha yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan desa. Berdasarkan dari hasil temuan dan analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BUMDesma sudah berjalan dengan baik tetapi masih dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik dengan didukung oleh sistem informasi akuntansi dan kebijakan pemerintah.
2. Berdasarkan model luder yang sudah diaplikasikan ke model kontigensi terbentuk hipotesis kerja dengan kontekstual variabel antara lain:
  - a. Stimuli: Dengan adanya BUMDesma diperlukan pengelolaan keuangan yang baik sebagai wujud peningkatan kesejahteraan desa.
  - b. Pengelolaan Keuangan: Diperlukan pengelolaan keuangan yang baik, terutama dalam pelaporan keuangan yang terstandarisasi menggunakan sistem informasi dan adanya kesempatan untuk pengembangan usaha
  - c. Hambatan Implementasi : Pengelolaan keuangan yang baik harus didukung oleh adanya sistem informasi akuntansi dalam bentuk aplikasi keuangan BUMDesma, SDM yang memadai dan kebijakan Pemerintah daerah yang mendukung.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Saran Praktis: Berdasarkan hasil penelitian hampir semua BUMDesma membutuhkan kebijakan tentang pengembangan usaha baru dikarenakan omset BUMDesma yang sudah cukup besar dan banyaknya *idle money* yang tidak diinvestasikan sehingga diharapkan

pemerintah daerah dapat membuat satu kebijakan baru tentang pengembangan usaha BUMDesma

2. Saran Teoritis: Berdasarkan hasil penelitian diharapkan untuk melengkapi hasil penelitian dengan data data kuantitatif terutama peluang atau analisis kelayakan usaha.

## REFERENCE

- Abdullah, F., Muhammad, M., & Mas'ud, A. A. (2024). Financial Management of Village-owned Enterprises Affected by Employee Competency and Organizational Culture. *MANDAR: Management Development and Applied Research Journal*, 6(2), 104–112. <https://doi.org/10.31605/mandar.v6i2.3845>
- Diansari, R. E., Musah, A. A., & Binti Othman, J. (2023). Factors affecting village fund management accountability in Indonesia: The moderating role of prosocial behaviour. *Cogent Business and Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2219424>
- Dina, I., & Diana Elvianita, M. (2017). Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar). *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis, 2017*, 41–51. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/6665>
- Fahrizal, M. G. (2018). Evaluasi implementasi pengelolaan keuangan desa di desa kedungmaling dan desa kumitir kabupaten mojokerto berdasarkan permendagri no. 113 tahun 2014. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(1), 1–7. <https://repository.unair.ac.id/79339/>
- Firdaus, M., & Faisol, I. A. (2020). Perspektif Akuntansi Atas Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Study Kasus BUMDESMA Kampung Batik Di Desa Klampar Kec. Proppo Kab. Pamekasan). *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 8(2), 90–99. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.8.2.90-99>
- Fitriansyah, A., & Halilintar, M. (2024). Implementation of the Village Financial System (Siskeudes) in Bandarjo Village. *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(7), 484–495. <https://doi.org/10.57096/edunity.v3i7.255>
- Judijanto, L., Sandy, S., Yanti, D. R., Kristanti, D., & Hakim, M. Z. (2023). Pengembangan Usaha Kecil Menengah (Ukm) Berbasis Inovasi Teknologi Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6 SE-Articles), 12500–12507. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i6.23244>
- Muntahanah, Siti. Murdijaningsih, T. (2020). Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. *F Ekonomi Universitas Wijayakusuma Purwokerto.*, 11. <https://core.ac.uk/download/pdf/267947579.pdf>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/199701/permendesa-pdtt-no-15-tahun-2021>
- Rustiawan, I., Ausat, A. M. A., Dadzali, S. S., Suherman, & Hizbul Khootimah Azzakiyyah. (2023). Determinants of Employee Dedication to The Company as a Whole. *Community Development Journal*, 4(1), 708–712. <https://core.ac.uk/download/555451946.pdf>
- Salamah, S. N. (2023). Financial Management Strategies to Improve Business Performance. *Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAN)*, 1(1), 9–12. <https://doi.org/10.61100/adman.v1i1.3>

- Sari, D. M. M. Y., & Sudana, I. P. (2020). Managerial Accountability of Badan Usaha Milik Desa Wija Sari in Samsam Village: A Case Study Research. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 15(2), 152-171. <https://doi.org/10.24843/jiab.2020.v15.i02.p02>
- Shamsiya Abidovna, A. (2024). the Role of Information Technology in the Personnel Management System. *International Scientific*, 3(2), 386–389. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10647479>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582>
- Wahyuddin, W., Ramly, A., Djalil, M. A., & Indriani, M. (2020). Utilization of local potentials, financial capital, human resources, and community participation in forming Village-Owned Enterprise (BUMDES) in Nagan Raya district. *JEM Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 6(1), 27-37. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=12821523372103063527&btnI=1&hl=id>
- Weber, P., Carl, K. V., & Hinz, O. (2024). Applications of Explainable Artificial Intelligence in Finance—a systematic review of Finance, Information Systems, and Computer Science literature. In *Management Review Quarterly* (Vol. 74, Issue 2), 867-907. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/s11301-023-00320-0>
- Widiyohening, C. R. (2023). Pelatihan Kapasitas SDM Bidang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Bersama (Bumdesma). *JCSE: Journal of Community Service and Empowerment*, 4(2), 201-209. <https://doi.org/10.32639/jcse.v4i2.743>
- Xu, X., & Zhang, H. (2024). Analysis of enterprise financial management under the background of digital transformation. *SHS Web of Conferences*, 181, 02030. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202418102030>
- Yubiharto, Y., & Hastuti, N. R. (2020). Pengaruh ROA, NPM Dan DER Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Pada BEI Tahun 2014-2018). *Medikonis: Jurnal Media Komunikasi Dan Bisnis*, 11(1), 59–70. <https://doi.org/10.52659/MEDIKONIS.V11I1.27>
- Yubiharto, Y., Mauliyah, S., & Rudianti, W. (2021). Faktor Ekonomi Makro Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (Ihsg) Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. *Medikonis*, 12(2), 42–53. <https://doi.org/10.52659/medikonis.v12i2.44>
- Yubiharto, Y., & Rudianti, W. (2021). The Effectiveness of Commissioners Board Size And Audit Committee Size on Risk Disclosure. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(1), 168. <https://doi.org/10.33087/jmas.v6i1.218>